

# TESIS

**REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI  
YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAWAH TANAH  
(PERKARA NOMOR 5499 K/PID.SUS/2024 Jo.  
329/PID.SUS/2023/PN.KTP)**

***REFORMULATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST  
CORPORATIONS HOLDING UNDERGROUND MINING BUSINESS  
PERMITS (VERDICT NUMBER 5499 K/ PID.SUS/ 2024 Jo. 329/ PID.SUS/  
2023/ PN.KTP)***



**Oleh:**

**JIMMI DOHAR PANDAPOTAN**

**NIM. 2310622058**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2025**

**TESIS**

**REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
KORPORASI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BAWAH TANAH (PERKARA NOMOR 5499  
K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP)**

***REFORMULATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST  
CORPORATIONS HOLDING UNDERGROUND MINING  
BUSINESS PERMITS (VERDICT NUMBER 5499 K/ PID.SUS/  
2024 Jo. 329/ PID.SUS/ 2023/ PN.KTP)***



**Oleh:**

**JIMMI DOHAR PANDAPOTAN**

**NIM. 2310622058**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2025**

**HALAMAN JUDUL**

**REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
KORPORASI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN BAWAH TANAH (PERKARA NOMOR 5499  
K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:**  
**JIMMI DOHAR PANDAPOTAN**  
**NIM. 2310622058**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
JAKARTA  
2025**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAWAH TANAH (PERKARA NOMOR 5499 K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP)**

Disusun dan diajukan oleh:

**JIMMI DOHAR PANDAPOTAN**

**NIM. 2310622058**

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

**Pembimbing 1**



**Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.**  
NIK. 216121211

**Pembimbing 2**



**Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIP. 198601272024061001



**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI  
YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAWAH TANAH  
(PERKARA NOMOR 5499 K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP)**

**Disusun dan diajukan oleh:**  
**JIMMI DOHAR PANDAPOTAN**  
**NIM. 2310622058**

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
Pada Tanggal 26 Juni 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

**Menyetujui:**

Pembimbing 1

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.  
NIK. 216121211

Pembimbing 2

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 198601272024061001

Koordinator Program Studi Hukum  
Program Magister

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.  
NIK. 196806081994032001



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Supriyanto, S.H., LL.M.  
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta  
Tanggal Ujian : 26 Juni 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : JIMMI DOHAR PANDAPOTAN  
NIM : 2310622058  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul  
**“REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG  
MEMPUNYAI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAWAH TANAH (PERKARA  
NOMOR 5499 K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP)**

adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya  
dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya  
bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik  
dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 29 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan,



JIMMI DOHARPANDAPOTAN

**NIM. 2310622058**

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JIMMI DOHAR PANDAPOTAN

NIM : 2310622058

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAWAH TANAH (PERKARA NOMOR 5499 K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP)** beserta perangkat

yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan,



JIMMI DOHAR PANDAPOTAN  
NIM. 2310622058

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus, karena atas berkat dan Anugerahnya-Nya, saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm., Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. Suherman S.H., LL.M., Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sekaligus Pembimbing yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
3. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. Koordinator Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
4. Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pertama dan Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
5. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm. Kes selaku penguji Seminar Proposal dan Seminar Hasil Tesis.
6. Dr. Ahmad Ahsian Thohari, S.H., M.H. selaku Penguji Seminar Proposal dan Ujian Tesis yang telah memberikan masukan dan memberikan ilmunya terkait penyusunan penelitian ini.

7. Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H. selaku Penguji dua Seminar Hasil Tesis yang telah memberikan masukan dan memberikan ilmunya terkait penyusunan penelitian ini.
8. Kedua Orang tua penulis, khususnya ibu penulis yang telah meninggal yang selalu menitip pesan agar terus sekolah yang tinggi menimba ilmu sebanyak – banyaknya yang dimana menjadi motivator terbesar dalam hidup penulis untuk menyelesaikan penyusunan penelitian ini.
9. Keluarga besar saya, anak – anak khususnya istri penulis yang selalu sabar dan juga telah memberikan support penuh dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Teman - teman dan rekan -rekan kerja penulis, yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
11. Dan seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis menghaturkan banyak terima kasih atas segala bantuan, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta,      Juni 2025  
Penulis

Jimmi Dohar Pandapotan

## **ABSTRAK**

### **REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI YANG MEMPUNYAI IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAWAH TANAH (PERKARA NOMOR 5499 K/PID.SUS/2024 Jo. 329/PID.SUS/2023/PN.KTP)**

Jimmi Dohar Pandapotan (2310622058), Handyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

Tindak pidana Administrasi Pertambangan sekarang ini sudah banyak terjadi sehingga menjadi perhatian serius khususnya banyaknya perusahaan – perusahaan yang mempunyai izin usaha pertambangan dan Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Berjalan terkena proses penyidikan di Kepolisian RI. Proses pro yustisia tersebut sejatinya tidak bisa diterapkan kepada korporasi yang mempunyai izin usaha pertambangan dan Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Berjalan karena pastinya ada tindakan hukum terlebih dahulu yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Cq. Direktorat Jenderal yaitu upaya administrasi dalam bentuk Pembinaan dan Pengawasan sehingga dalam hal ini terdapat tumpang tindih kewenangan dan aturan yang mengakibatkan adanya ketidak pastian dan kemanfaatan hukum. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui penelitian putusan pengadilan dari tingkat pertama sampai putusan akhir dan dari kepustakaan. Hasil dari pendekatan penelitian ini, diperlukan adanya ketentuan yang jelas untuk mengakomodir pidana administrasi pertambangan khusus kepada perusahaan yang mempunyai izin usaha pertambangan dan Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, kepentingan hukum, dan kepentingan negara. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan dalam perkara-perkara pidana pertambangan baik dalam perkara pada penelitian maupun perkara yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** pertambangan; pidana; IUP; RKAB; kewenangan; asas manfaat.

## **ABSTRACT**

### **REFORMULATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST CORPORATIONS HOLDING UNDERGROUND MINING BUSINESS PERMITS (VERDICT NUMBER 5499 K/PID.SUS/2024 Jo.329/PID.SUS/2023/PN.KTP)**

Jimmi Dohar Pandapotan (2310622058), Handoyo Prasetyo, Slamet Tri Wahyudi

*Administrative Mining crimes have now occurred so frequently that they have become a serious concern, especially since many companies that have mining business permits and Current Budget Activity Plans are being investigated by the Indonesian Police. The pro yustisia process cannot actually be applied to corporations that have mining business permits and Current Budget Activity Plans because there must be legal action first taken by the Ministry of Energy and Natural Resources Cq. Directorate General, namely administrative efforts in the form of Guidance and Supervision so that in this case there is an overlapping of authority and regulations that result in uncertainty and legal benefits. In this study, normative legal research is used through research on court decisions from the first level to the final decision and from the literature. The results of this research approach, it is necessary to have clear provisions to accommodate special mining administrative crimes for companies that have mining business permits and Current Budget Activity Plans while still considering public interests, legal interests, and state interests. This is done to realize justice in mining criminal cases both in cases in research and cases that may occur in the future.*

**Keywords:** *mining; criminal; IUP; RKAB; authority; principle of benefit.*

## DAFTAR ISI

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>HALAMAN SAMPUL TESIS</b> .....                                       | i   |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                              | ii  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                                     | iii |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....                                    | iv  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....                                        | v   |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....                           | vi  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                             | vii |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                    | ix  |
| <b>ABSTRACT</b> .....                                                   | x   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                 | xi  |
| <b>BAB I</b> .....                                                      | 1   |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                                                | 1   |
| <b>A. Latar Belakang</b> .....                                          | 1   |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....                                         | 9   |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....                                       | 9   |
| <b>D. Manfaat Penelitian</b> .....                                      | 10  |
| <b>E. Orisinalitas Penelitian</b> .....                                 | 11  |
| <b>BAB II</b> .....                                                     | 13  |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                           | 13  |
| <b>A. Kajian Teoritis</b> .....                                         | 13  |
| 1. Teori Relatif dalam Tujuan Pemidanaan ( <i>Doeltheorieen</i> ) ..... | 13  |
| 2. Teori Kewenangan .....                                               | 16  |
| 3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....                         | 19  |
| 4. Teori Efektivitas Hukum .....                                        | 21  |
| <b>B. Kerangka Pikir</b> .....                                          | 22  |
| <b>C. Definisi Operasional</b> .....                                    | 23  |
| <b>BAB III</b> .....                                                    | 26  |
| <b>METODE PENELITIAN</b> .....                                          | 26  |
| <b>A. Tipe dan Pendekatan Penelitian</b> .....                          | 26  |

|                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....                                                                                                                                                                                | 27  |
| C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                                                                                                                             | 29  |
| D. Analisis Bahan Hukum.....                                                                                                                                                                                        | 29  |
| BAB IV .....                                                                                                                                                                                                        | 30  |
| HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                                                                                                          | 30  |
| A. Penerapan ketentuan pasal 158 Undang – Undang nomor 3 tahun 2020 Jo Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap korporasi yang mempunyai izin usaha pertambangan. .... | 30  |
| B. Formulasi ideal terkait Penegakan Hukum pada korporasi yang mempunyai izin pada Undang – Undang nomor 3 tahun 2020 Jo Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. ....         | 78  |
| BAB V.....                                                                                                                                                                                                          | 102 |
| PENUTUP.....                                                                                                                                                                                                        | 102 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                                                  | 102 |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                                      | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                                                                                                 | 104 |